



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALFAN GUNAWAN AHMAD  
2. Jabatan : WAKIL DEKAN I  
3. NHK : 912979

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **934.000.000**

1. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000  
2. Bangunan Seluas 84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000  
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000  
4. Bangunan Seluas 97 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **248.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000  
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS ADVENTURE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
3. MOTOR, YAMAHA BK 6 R M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000  
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000  
5. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **13.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.075.433
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.199.075.433
III. HUTANG	Rp.	17.356.325
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.181.719.108

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.